

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah peradaban Aceh begitu panjang, penuh liku dan timbul tenggelam. Sejarah pernah mencatat bagaimana kegemilangan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejarah juga mencatat bagaimana kegemilangan itu berangsur angsur pudar dan kemudian hilang dalam hiruk pikuk konflik yang berkepanjangan. Aceh merupakan daerah yang mempunyai sumber daya alam yang memadai dan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Dilihat dari konteks sejarah, status Pemerintahan Aceh sudah mengalami beberapa perubahan dari keresidenan sampai lahirnya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh sangatlah unik untuk dikaji karena terjadi suatu pasang surut suatu hubungan. Presiden Soeharto pada tahun 1989 menyatakan Aceh sebagai Daerah Otonomi Militer (DOM) yang menyebabkan hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh menjadi agak renggang. Setelah DOM dicabut tanggal 7 Agustus 1998. Gejolak politik di Aceh tetap masih terjadi. Pemerintahan pusat mengeluarkan sebuah UU Nomor 44 Tahun 1999 yaitu UU Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU No. 44 Tahun 1999 ini merupakan Undang-undang yang menegaskan kembali status keistimewaan Aceh setelah diberikan

T. Bahagia Kesuma, 2012

status keistimewaaan seperti yang tertuang di dalam Keputusan Perdana Menteri Indonesia No. 1/MISSI/1959 yang menetapkan daerah Swatantra Tingkat I Aceh sejak 16 Mei 1959 menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 2001 masa Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang menggantikan B.J. Habibie melakukan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah lama terjadi dengan cara mengunjungi Banda Aceh dan menawarkan otonomi seluas-luasnya, menerapkan syariat Islam dan bagi hasil dan pendapatan eksploitasi minyak dan gas bumi kepada daerah Aceh. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Abdurahman Wahid disetujui secara bulat oleh DPR. Otonomi khusus ini tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 (Kaliwarang, 2008 :159).

Dinamika hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Aceh pada masa pada 1999-2006 sangat menarik untuk peneliti tulis menjadi sebuah skripsi karena periode ini terdapat empat kali pergantian Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden yang menjabat pada masa 1999-2006 adalah B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keempat presiden tersebut melakukan pendekatan-pendekatan berbeda-beda yang menarik untuk peneliti kaji menanggapi gejolak yang terjadi di "*tanah rencong*" tersebut. Apabila tidak diteliti, generasi yang akan datang tidak mengetahui bagaimana

T. Bahagia Kesuma, 2012

proses dinamika di Aceh selama periode 1999-2006. Dengan diteliti dinamika yang terjadi pada masa 1999-2006 di Aceh ini, akan memiliki manfaat berhubungan dengan proses terjadinya dinamika di Provinsi paling barat di Indonesia, sehingga tidak hilangnya catatan sejarah Aceh pada masa 1999-2006 di masa yang akan datang.

Pada masa 1999-2006 banyak peristiwa penting yang membuat peneliti tertarik dalam menulis skripsi ini yaitu pada periode ini Aceh memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang menyebabkan adanya dua undang-undang yang berlaku di Aceh. Pada masa ini juga terdapat banyak kejadian penting antara lain Aceh dijadikan sebagai Darurat Militer kemudian diganti menjadi Darurat Sipil dan kemudian diganti menjadi Tertib Sipil. Selain itu peneliti ingin mengetahui alasan gagalnya perundingan antara GAM dan Pemerintahan RI yang diprakasai oleh *Henry Dunant Centre* (HDC) seperti gagalnya perjanjian penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement* atau CoHA) sampai munculnya keterlibatan organisasi *Crisis Management Initiative* (CMI) pimpinan mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang melahirkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Perlunya diteliti agar kita mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Aceh menuntut diberikan hak-hak istimewa serta bagaimana reaksi atau respon pemerintahan terhadap tuntutan tersebut dan mengapa pemerintahan pusat seolah olah mencurigai Aceh ingin melepaskan diri dari NKRI. Perlu juga diteliti

T. Bahagia Kesuma, 2012

mengapa tuntutan Aceh dijawab dengan senjata. Selain itu perlunya ditelaah bagaimana kondisi masyarakat pada saat pergantian status melalui undang-undang itu akan disahkan serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Suatu keputusan yang diambil oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari keadaan masyarakat daerah tersebut. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui mengenai kondisi masyarakat Aceh pada tahun 1999-2006 yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan Aceh.

Pada masa ini perubahan status daerah Aceh telah berganti berulang kali. Perubahan bentuk pemerintahan dan terjadinya suatu dinamika yang sangat unik cukup memperkuat perlunya dilakukan penelitian. Permasalahan tersebut akan menarik untuk kita bahas bagaimana hubungan Aceh dengan Pemerintahan Pusat (Jakarta). Hal ini juga akan berhubungan dengan *stereotype* masyarakat Aceh terhadap orang luar Aceh (baca : Jawa) sehingga pada akhirnya dijawab dengan berbagai cara oleh pemerintahan pusat salah satunya operasi militer di Aceh.

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejarah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh dari mulai tahun 1999 sampai dengan 2006. Dasar pemikiran tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”.

1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah

T. Bahagia Kesuma, 2012

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah mengenai Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian, sehingga materi tidak meluas dan penelitian dilakukan lebih terfokus, peneliti membuat sebuah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pergantian status Pemerintahan Aceh dalam NKRI pada tahun 1999-2006?
2. Bagaimana realisasi pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh 1999-2006?
3. Bagaimana kondisi masyarakat Aceh ditinjau dari aspek sosial, politik dan keamanan setelah pergantian dan pelaksanaan status Pemerintahan Aceh 1999-2006?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan terjadi pergantian status Pemerintahan Aceh dalam NKRI pada tahun 1999-2006.
2. Bagaimana realisasi pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh 1999-2006.

3. Mengetahui pengaruh setelah pergantian dan pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh ditinjau dari aspek sosial, politik dan keamanan 1999-2006.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dinamika hubungan yang unik antara Pemerintahan pusat dan daerah.
2. Mengetahui kondisi sosial, politik dan keamanan dalam masyarakat Aceh tahun 1999-2006.
3. Memberikan informasi yang komprehensif serta pemahaman kepada kalangan umum khususnya peminat sejarah mengenai sejarah perubahan status Pemerintahan Aceh.
4. Mengetahui alasan status Pemerintahan Aceh sering mengalami pergantian di dalam NKRI.
5. Memperkaya penulisan sejarah Indonesia khususnya sejarah Aceh.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan dua tujuan. Pertama, sebagai langkah bagi penulis untuk menyusun bab-bab yang belum terselesaikan, yaitu bab dua dan seterusnya. Kedua, untuk mempermudah pembaca dalam menyimak dan memahami keseluruhan bagian skripsi. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian dan penulisan skripsi ini, Sistematika dari hasil penelitian akan disusun kedalam lima bab yang terdiri dari:

T. Bahagia Kesuma, 2012

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang didalamnya termuat mengenai alasan dan pentingnya penelitian mengenai “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah : “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Pada bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan untuk memudahkan peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah “Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah : “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”. Untuk mengkaji dan memahami serta menganalisis sejauh mana pembahasan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini serta pendekatan yang digunakan untuk melihat dinamika hubungan Pemerintahan Pusat dan Aceh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

T. Bahagia Kesuma, 2012

Bab ini membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan sistematika penulisannya. Semua prosedur dalam penelitian akan di bahas pada bab ini.

BAB IV DINAMIKA HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN ACEH DARI 1999-2006

Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan alasan status Pemerintahan Aceh dalam NKRI telah berkali-kali berganti. Kondisi sosial, politik dan keamanan masyarakat Aceh pada saat status Pemerintahan itu di diganti dari mulai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ke UU Pemerintahan Aceh disahkan. Realisasi pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai pengaruh pergantian dan pelaksanaan status Pemerintahan Aceh terhadap perkembangan masyarakat Aceh ditinjau dari aspek sosial, politik dan keamanan yang akan mencerminkan sebuah pasang surut

hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Aceh).

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan yang merupakan jawaban dari masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan. Rekomendasi ditujukan kepada lembaga yang berkaitan antara lain Pemerintahan Pusat, DPR RI, DPRA, eks GAM, Pemerintahan Daerah, Masyarakat Aceh dan Peneliti selanjutnya.